

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Visi :

“Menjadikan lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”.

b. Misi :

- 1) Mengarustamakan pembangunan berkawasan kependudukan
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 5 sasaran strategis, yaitu:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
- b. Meningkatkan Prevalensi Kontrasepsi (CPR) Modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

- d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 Tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi kedudukan, tugas dan fungsi perwakilan BKKBN Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Kependudukan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertanggungjawab kepada kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

b. Tugas

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Fungsi

Dalam hal ini, melaksanakan tugas yang dimaksud diatas perwakilan BKKBN DIY menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan, pembimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

- 2) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- 3) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- 4) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar, dilapangan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- 6) Pelaksanaan tugas administrasi umum.
- 7) Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

3. BKKBN mempunyai tugas:

“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pemandu dan sinkronisasi kebijakan dibidang KKB.
- b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB.
- c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB
- d. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
- e. Penyusunan program KKBPK.
- f. Pengelolaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB.
- g. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur nasional.
- h. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
- i. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi.
- j. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- l. Standarlisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB.

- m. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- n. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas dibidang KKB.

4. Strukur Organisasi dan Sumber Daya

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A yang berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

- 1) Sekertariat
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk
- 3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- 5) Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
- 6) Bidang Pelatihan dan Pengembangan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2016 sebanyak 110 orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai per Jenis Jabatan per 31 Desember 2016

Jenis Jabatan	Jumlah Orang	
	2016	2015
Struktural	27	22
Fungsional Widyaiswara	7	8
Fungsional Auditor	4	4
Fungsional Arsiparis	2	2
Fungsional Peneliti	1	1
Fungsional Auditor Kepegawaian	1	1
Fungsional Umum	68	74
Total	110	112

Sumber: Subbag. Kepegawaian dan Hukum

Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2015 sebanyak 112 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2016 berkurang sebanyak 2 orang karena adanya pegawai yang purna tugas sebanyak 4 orang dan terdapat pegawai mutasi ke Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 2 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang	
	2016	2015
Pasca Sarjana (S2)	27	24
Sarjana/Diploma IV	42	45
Diploma III	5	6
SLTA	32	33
SLTP	2	2
SD	2	2
Total	110	112

Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum

Beberapa pegawai mengalami peningkatan pendidikan dari jenjang S1/DIV ke S2 sebanyak 3 orang meliputi lulus tugas belajar sebanyak 1 orang dan tambahan mutasi masuk yang sudah berpendidikan S2 sebanyak 2 orang. Sehingga untuk pendidikan S1/DIV mengalami penurunan dari 45 menjadi 42.

c. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2016 dibiayai dari DIPA Tahun 2016. Jumlah anggaran selama tahun 2016 seluruhnya sebesar Rp. 28.888.358.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 26.544.399.276,- atau 91,89% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi s.d 31 Desember 2016

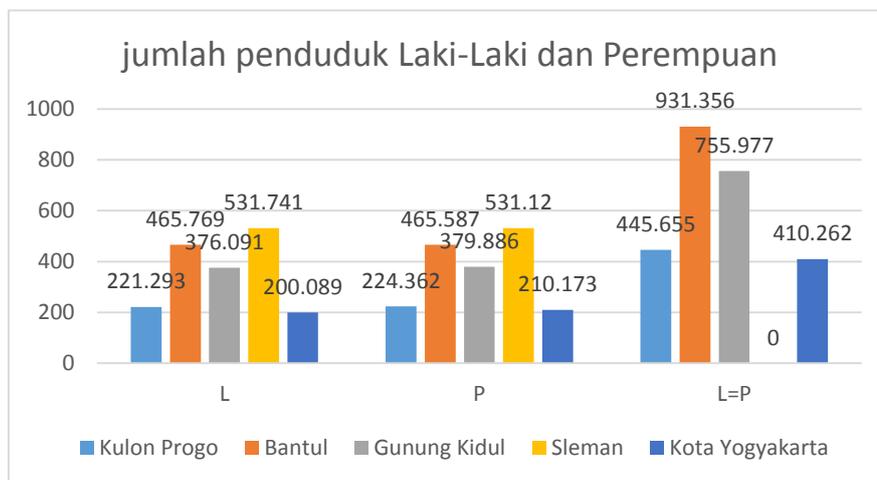
Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
DIPA	Rp. 28.888.358.000,-	Rp. 26.544.399.276,-	91,89

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN

B. Profil Pendudukan DIY

Data penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut jumlah penduduk pada tahun 2017 menurut jumlah penduduk Laki-Laki dan Perempuan pada tahun 2017 yaitu:

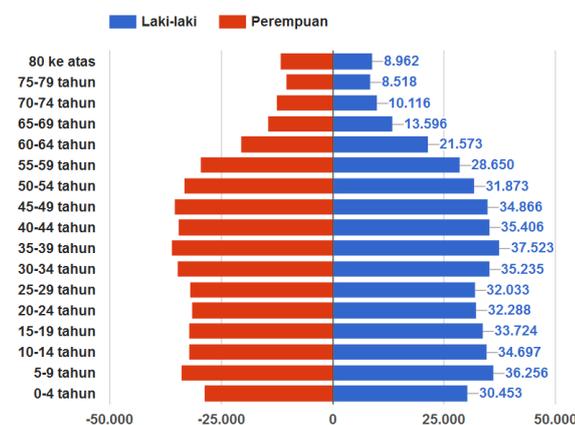
Grafik 2.1
Jumlah Penduduk DIY Laki-Laki dan Perempuan



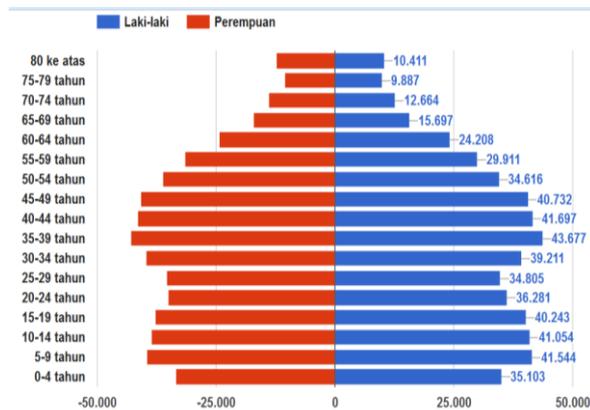
Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Berikut data pendudukan DIY berdasarkan umur per 5 tahun yang di sajikan dalam bentuk grafik:

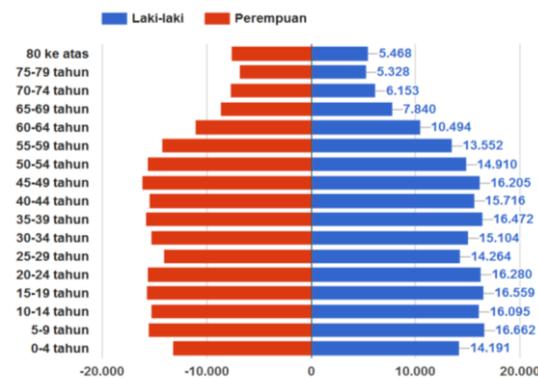
Grafik 2.2
Penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan umur per 5 tahun



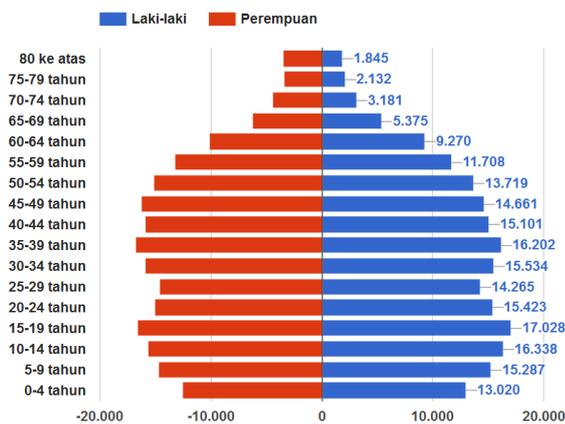
Grafik 2.3
Penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan umur per 5 tahun



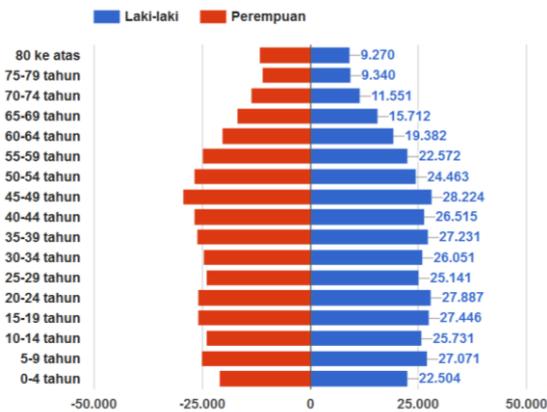
Grafik 2.4
Penduduk Kabupaten Kulon Progo berdasarkan umur per 5 tahun



Grafik 2.5
Penduduk Kabupaten Kota Yogyakarta berdasarkan umur per 5 tahun



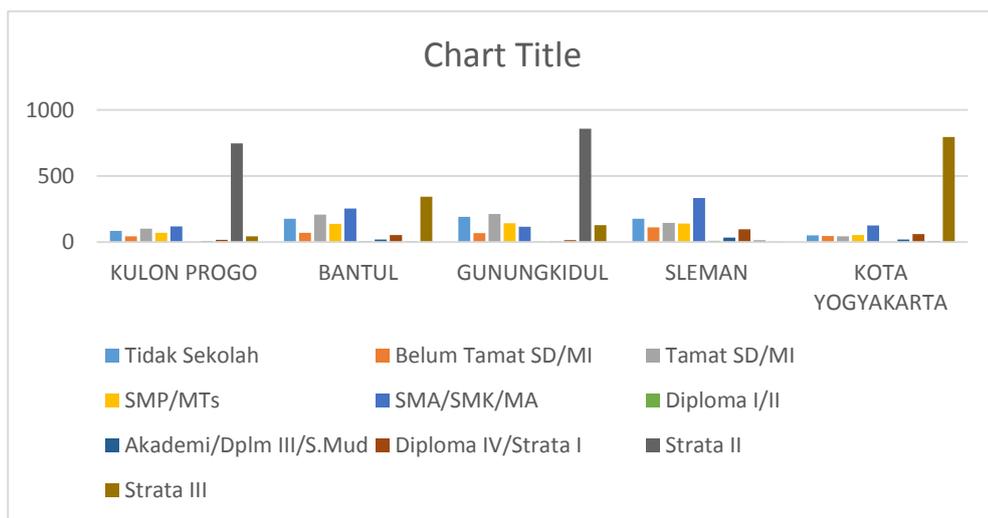
Grafik 2.6
Penduduk Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan umur per 5 tahun



Sumber: diolah dari bagian kependudukan biro tata pemerintahan setda DIY

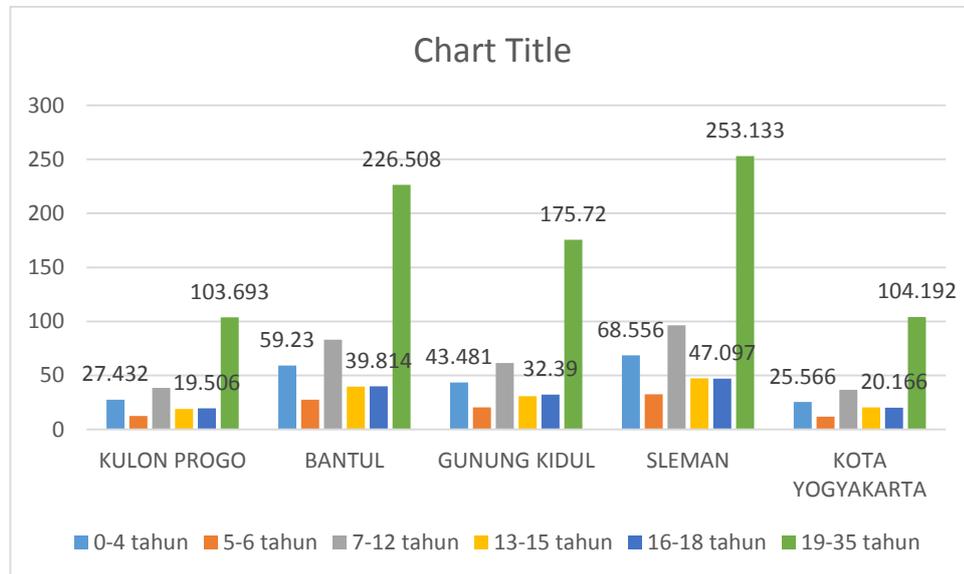
Setelah mengetahui jumlah penduduk DIY berdasarkan umur, kemudian grafik menyajikan data penduduk DIY berdasarkan jenjang pendidikan:

Grafik 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan DIY 2017



Sumber: diolah dari bagian kependudukan biro tata pemerintahan setda DIY

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah DIY 2017



Sumber: diolah dari bagian kependudukan biro tata pemerintahan setda DIY

C. Profil Rumah Data

1. Pengertian Rumah Data Kependudukan

Rumah Data adalah rumah yang di fungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan kependudukan ditingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi data kependudukan yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Rumah Data

Adapun tujuan dibentuknya Rumah Data Kependudukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan mitra kerja dalam pengelolaan data kependudukan dilevel mikro di Kampung KB.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan.
- c. Meningkatkan sinergitas komponen BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan, KB, pembangunan keluarga, dan pembangunan sektor lain.
- d. Meningkatkan modal sosial, wahana belajar dan berinteraksi masyarakat melalui media data, modul-modul, buku bacaan atau melalui penggunaan jaringan internet di Kampung KB.

Sejalan dengan pembentukan nya, maka terdapat 3 fungsi utama Rumah

Data Kependudukan sebagai:

- a. Pusat data dan informasi
- b. Pusat intervensi masalah kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor lain
- c. Pusat integrasi aktivitas kampung KB

3. Struktur Organisasi Rumah Data

Gambar 2.1
Struktur Organiosasi

